BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik (Mardiasmo, 2017), dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu cara dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pemerintah adalah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual (Rosiana, 2015). Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima/dibayar (PP No. 71 Tahun 2010).

Pada tahun 2015 merupakan tahun pertama kali implementasi akuntansi berbasis akrual di seluruh entitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan harus menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010. Standar akunntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuanagan (PP No. 71 Tahun 2010). Standar ini menyempurnakan peraturan pemerintah sebelumnya yaitu PP No. 24 Tahun 2005 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sedangkan PP No. 71 Tahun 2010 merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Perubahan SAP

(2010) dibandingkan dengan SAP (2005) adalah diterapkannyan SAP *full accrual* basis yakni mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Lukum, 2015). Berlakunya PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah.

Menurut pemerintah, melalui implementasi standar akuntansi berbasis akrual kualitas penyajian informasi keuangan organisasi pemerintah dapat ditingkatkan. Laporan keuangan yang baik harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan adalah merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan (Mahmudi, 2016).

Kota Pangkalpinang sendiri sudah menerapkan PP No. 71 tahun 2010 sejak satu tahun yang lalu. Walaupun sudah diterapkan PP No. 71 Tahun 2010 masih banyak aparatur sipil negara yang belum mengerti dan memahami tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Permasalahan yang utama adalah terdapat perbedaan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baik dari segi kuantitas

maupun kualitas laporan keuangan, dari sebelumnya hanya empat laporan berubah dan sekarang menjadi tujuh laporan keuangan yaitu: laporan realisasi anggaran (lra), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010).

Hal yang paling sering muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang tidak kompeten dan cenderung terhadap perubahan. Sumber daya manusia disini, lebih merujuk pada aparatur sipil negara yang ada di pemerintah pusat maupun daerah. Ketidakmampuan aparatur sipil negara dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak hanya berpengaruh pada informasi pelaporan yang dihasilkan tetapi dapat berakibat pada proses transparansi pelaporan keuangan yang ada, dan juga diperlukan informasi pelaporan yang relevan dan andal dari laporan keuangan. Sehingga diperlukan aparatur sipil negara yang berkompeten agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas untuk meningkatkan transparansi pelaporan keuangan.

Maka dari itu, pemahaman aparatur sipil negara atas PP No. 71 Tahun 2010 memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Oktarina, dkk 2014). Masih buruknya pembenahan pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat maupun daerah saat ini tidak terlepas dari faktor penerapan standar akuntansi pemerintahan yang masih tergolong baru dilingkungan pemerintah. Adanya keterbatasan aparatur sipil

negara yang kurang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang menjadi kendala dalam mewujudkan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berkualitas. Untuk meningkatkan tingkat pemahaman dari aparatur sipil negara tersebut dibutuhkan pengetahuan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, latar belakang pendidikan dan *skill* yang merupakan indikator dari masalah tersebut. Untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan-kemampuan karyawan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Karena pendidikan dan pelatihan juga merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian karyawan. Selain itu keterampilan dan *skill* karyawan juga dapat diukur dengan lama masa kerja atau pengalaman kerjanya. Pengalaman akan menentukan dalam melaksanakan tugas tertentu (Kholiq, 2014).

Berdasarkan teori dari beberapa ahli, PP No. 71 Tahun 2010 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya tingkat pemahaman aparatur sipil negara serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada pemerintah daerah, khususnya pada pemerintah kota pangkalpinang dengan judul**" Persepsi Tingkat Pemahaman Aparatur Sipil Negara Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Tingkat Pemahaman Aparatur Sipil Negara berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pegawai Aparatur Sipil Negara dalam bidang akuntansi dan tata usaha keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Persepsi Tingkat Pemahaman Aparatur Sipil Negara Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan PP No.71 Tahun 2010.

1.5 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Untuk bidang akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas ilmu pengetahuan tentang akuntansi, akuntansi pemerintahan di Indonesia, dan sebagai referensi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, rerangka pemikiran, perbedaan penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang pembahasan serta analisis yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya.